

STATISTIK PENDIDIKAN

KABUPATEN PINRANG

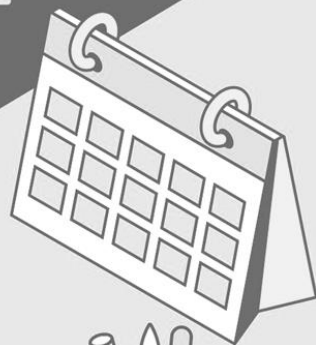
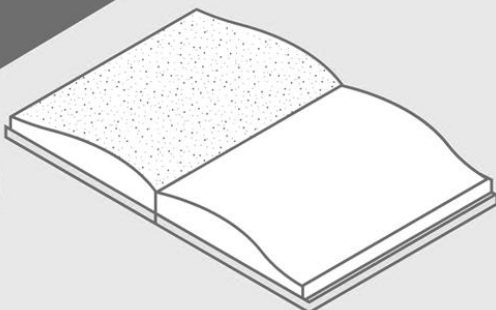
2021



STATISTIK PENDIDIKAN

KABUPATEN PINRANG

2021



STATISTIK PENDIDIKAN KABUPATEN PINRANG 2021

Nomor Publikasi : 73150.2225
Katalog : 4301002.7315
Ukuran Buku : 14,8 x 21 cm
Jumlah Halaman : viii + 50 halaman
Naskah : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang

Tim Penyusun Naskah

Penanggung Jawab : H. Muhammad Asri Lantong, S.E.
Koordinator : Ugiana Ramdhani, SST, M.S.E.
Anggota : Ekwinda Linggar Surya Kusuma, S.Si.

Penyunting : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang
Gambar Kover : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang
Penerbit : © Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang
Pencetak : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang
Sumber Ilustrasi : www.carva.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Pendidikan sebagai salah satu bentuk investasi yang menentukan masa depan bangsa di masa mendatang, sudah selayaknya direncanakan sebaik-baiknya untuk hasil yang berkualitas. Peserta didik diharapkan mampu bertahan dengan baik serta mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Pendidikan bermutu sebagai hasil upaya tersebut akan menjadi modal menuju Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Pendidikan tidak hanya menjadi salah satu isu di Indonesia tetapi juga menjadi salah satu isu yang disorot dunia. Bidang pendidikan menjadi tujuan ke-4 dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yakni menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Selain itu, bidang pendidikan juga menjadi salah satu arah utama pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) diharapkan dapat mencetak generasi penerus bangsa yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.


Publikasi dengan judul “Statistik Pendidikan Kabupaten Pinrang 2021” ini merupakan publikasi yang disusun oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. Publikasi ini

menyajikan data yang dikumpulkan langsung oleh BPS melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret Tahun 2021, untuk memberikan gambaran mengenai kondisi Pendidikan di Pinrang secara umum.

Publikasi ini menyajikan informasi dasar mengenai angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi murni (APM), angka partisipasi kasar (APK), angka buta huruf, penduduk yang tidak bersekolah lagi, dan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Penyajian publikasi ini di susun secara deskriptif dalam bentuk narasi, ulasan singkat, dan grafik yang berbasis gender, serta dilampirkan tabel-tabel pendukung untuk menunjang informasi.

Terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saran dan kritik yang konstruktif sangat kami hargai untuk perbaikan publikasi yang akan datang. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Pinrang, Desember 2022
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PINRANG



H. Muhammad Asri Lantong, S.E.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan	6
1.3. Sumber Data	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II.....	9
METODOLOGI.....	9
2.1. Ruang Lingkup	9
2.2. Kerangka Sampel	10
2.3. Rancangan Sampel.....	11
2.4. Metode Pengumpulan Data.....	12
2.5. Pengolahan Data.....	12
BAB III.....	13
KONSEP DAN DEFINISI.....	13

BAB IV.....	19
PARTISIPASI SEKOLAH.....	19
4.1. Angka Partisipasi Sekolah.....	19
4.1.1. Partisipasi Siswa pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).....	19
4.1.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun.....	21
4.2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SMP, dan SMA ...	23
4.3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP, dan SMA.	25
BAB V.....	28
CAPAIAN PENDIDIKAN.....	28
5.1. Angka Buta Huruf.....	28
5.2. Penduduk yang Tidak Bersekolah Lagi.....	33
5.3. Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.....	34
5.4. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).....	36
BAB VI.....	38
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN.....	38
6.1. Fasilitas Pendidikan dan Jumlah Siswa.....	38
6.2. Rasio Murid/Siswa terhadap Sekolah dan Guru.....	39
PENUTUP.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	47
LAMPIRAN.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Persentase Penduduk Usia 0-6 Tahun yang Masih/Pernah Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah Menurut Jenis Kelamin, 2020-2021.....	21
Tabel 2.	Angka Buta Huruf (ABH) Penduduk 15 Tahun ke atas Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang, 2021	31
Tabel 3.	Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang, 2021.....	34
Tabel 4.	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pinrang, 2021	39

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang, 2021 22
- Gambar 2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SMP dan SMA Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang, 2021 25
- Gambar 3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP, dan SMA Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang Tahun 2021 26
- Gambar 4. Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang, 2021 30
- Gambar 5. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang, 2021 35
- Gambar 6. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas di Kabupaten Pinrang, 2017-2021 37
- Gambar 7. Rasio Murid Terhadap Sekolah Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan SLB di Kabupaten Pinrang, 2021 40
- Gambar 8. Rasio Murid Terhadap Guru Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK di Kabupaten Pinrang, 2021 41
- Gambar 9. Rasio Guru Terhadap Sekolah Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK di Kabupaten Pinrang, 2021 43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah modal utama dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, kualitas SDM perlu terus ditingkatkan agar mampu memberikan daya saing yang tinggi sehingga Indonesia bisa tumbuh secara berkelanjutan dan menjadi negara berpenghasilan menengah tinggi. Tidak dipungkiri, pendidikan merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sebagai salah satu aspek yang sangat penting dan strategis bagi kehidupan manusia, pendidikan berperan secara signifikan dalam membekali manusia untuk menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan dan perubahan yang nantinya akan berpengaruh secara positif terhadap lingkungan di sekitarnya.

Pembangunan di bidang pendidikan telah disepakati oleh para pemimpin dunia yang dituangkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (*Sustainable Development Goals/SDGs*) tepatnya pada Tujuan ke-4 yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

Ke depannya, fokus pembangunan pendidikan merupakan lanjutan pembangunan pendidikan sebelumnya,

yakni mengutamakan peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas (RPJMN 2020-2024). Tingkat pendidikan masyarakat telah membaik, namun belum menjangkau seluruh penduduk. Kesenjangan pendidikan antarkelompok ekonomi masih menjadi permasalahan dan semakin lebar seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan. Kesenjangan pendidikan juga masih tinggi apabila dibandingkan antar wilayah. Pembelajaran berkualitas juga belum berjalan secara optimal dan merata antarwilayah. Sejumlah langkah sudah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Akan tetapi, upaya yang dilakukan belum dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang menumbuhkan kecakapan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*). Hasil PISA (*Program for International Student Assessment*) tahun 2018 menunjukkan bahwa proporsi siswa di Indonesia yang berada di atas standar kompetensi masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN.

Pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 31 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Selanjutnya, dalam Ayat 2 ditekankan agar pemerintah mengusahakan dan

menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur oleh undang-undang sehingga memungkinkan warganya mengembangkan diri sebagai manusia Indonesia seutuhnya.

Pendidikan merupakan upaya yang terorganisir, berencana, dan berlangsung kontinu (terus menerus sepanjang hayat) ke arah membina manusia/anak didik menjadi insan paripurna, dewasa, dan berbudaya (*civilized*). Terorganisir memiliki makna bahwa pendidikan tersebut dilakukan oleh usaha sadar manusia dengan dasar dan tujuan yang jelas, ada tahapan dan ada komitmen bersama. Adapun berencana mengandung arti bahwa pendidikan itu direncanakan sebelumnya, dengan suatu perhitungan yang matang dan berbagai sistem pendukung yang disiapkan. Sementara berlangsung kontinu berarti bahwa pendidikan itu berlangsung terus menerus sepanjang hayat, yaitu sepanjang manusia hidup di muka bumi.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 menggariskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun Sistem

Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Tujuan dari pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan, dan cinta tanah air agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Melihat pentingnya pembangunan di bidang pendidikan, sejak awal kemerdekaannya Indonesia telah mencanangkan kebulatan tekad bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah suatu keharusan dan mesti diutamakan. Ikrar tersebut terpatri dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 dalam suatu kalimat **“MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA”**.

Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan menengah, yakni SD dan SMP atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah

kejuruan, yakni SMA dan SMK atau bentuk lain yang sederajat. Selanjutnya, pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Selanjutnya, pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Sedangkan, kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Guna menentukan strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan pembangunan di bidang pendidikan, dibutuhkan informasi yang secara lengkap dapat menjelaskan kondisi dan situasi pembangunan pendidikan di Indonesia khususnya di Kabupaten Pinrang. Informasi tersebut digambarkan melalui berbagai macam indikator yang berkaitan dengan capaian pembangunan di bidang pendidikan dan disajikan dalam bentuk buku publikasi **“Statistik Pendidikan Kabupaten Pinrang 2021”**.

Secara umum, publikasi ini menyajikan data dan informasi mengenai dunia pendidikan yang diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi kebijakan maupun program pembangunan di bidang

pendidikan berdasarkan data yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2021. Selain itu digunakan juga data sekunder dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang tahun ajaran 2021/2022 dan dari Kementerian Agama Kabupaten Pinrang.

Gambaran keadaan pendidikan di Kabupaten Pinrang akan dilihat secara khusus melalui beberapa indikator penting, yakni kemampuan baca tulis penduduk (Angka Melek Huruf), Tingkat Partisipasi Sekolah yang meliputi Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Siswa Menurut Jenjang Pendidikan dan Partisipasi Sekolah Anak Usia Pra Sekolah. Indikator-indikator tersebut merupakan indikator pendidikan yang biasanya dipakai untuk mengukur hasil pembangunan di bidang pendidikan, misalnya program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun dan penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

1.2. Tujuan

Publikasi ini disusun untuk menyediakan data tentang keadaan kesejahteraan penduduk dilihat dari sektor pendidikan yang meliputi kemampuan baca tulis, tingkat pendidikan yang ditamatkan dan atau status pendidikan yang sedang diikuti. Secara spesifik, tujuan penyusunan publikasi ini, antara lain:

1. Menyediakan data statistik berupa gambaran pendidikan penduduk Kabupaten Pinrang.
2. Menyediakan data dasar pendidikan Kabupaten Pinrang untuk membantu pemangku kepentingan dalam mengambil berbagai kebijakan publik, khususnya di bidang pendidikan.
3. Memberikan gambaran kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam melakukan evaluasi pembangunan, khususnya dalam bidang pendidikan.

1.3. Sumber Data

Indikator pendidikan bersumber dari data hasil Susenas Kor Maret 2021. Susenas merupakan survei semesteran yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial ekonomi dengan cakupan yang relatif luas. Pelaksanaan Susenas dilaksanakan secara serempak di seluruh Indonesia. Untuk Kabupaten Pinrang, sampelnya tersebar di 12 kecamatan yang mencakup seluruh wilayah baik perkotaan maupun perdesaan. Selain itu, digunakan juga data sekunder dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang dan Kementerian Agama Kabupaten Pinrang, data semester ganjil tahun ajaran 2021/2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Pembahasan utama publikasi ini dirinci ke dalam lima bab, dilengkapi dengan tabel dan grafik dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN, berisi latar belakang penyusunan publikasi, tujuan, dan sistematika penyajian.
- BAB II. METODOLOGI, menyajikan metodologi penyusunan publikasi berisi ruang lingkup, kerangka sampel, rancangan sampel, metode pengumpulan data, dan pengolahan data.
- BAB III. KONSEP DAN DEFINISI, menyajikan konsep dan definisi berisi berbagai konsep dan definisi yang digunakan dalam penyusunan publikasi.
- BAB IV. PARTISIPASI SEKOLAH, menyajikan pembahasan tentang Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK).
- BAB V. CAPAIAN PENDIDIKAN, menyajikan Angka Melek Huruf, Angka Buta Huruf, Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).
- BAB VI. SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN, menyajikan jumlah sekolah, jumlah siswa, jumlah guru, dan rasio murid/siswa terhadap sekolah dan guru.
- BAB VII. PENUTUP, menyajikan kesimpulan.

BAB II METODOLOGI

Publikasi ini disusun berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Bulan Maret tahun 2021. Seperti halnya publikasi tahun sebelumnya, metodologi, konsep dan definisi Susenas tetap dicantumkan untuk memberikan arah dan panduan dalam pemanfaatan data yang disajikan.

2.1. Ruang Lingkup

Susenas Maret 2021 dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dengan ukuran sampel sebesar 345.000 rumah tangga sampel yang tersebar di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota baik merupakan daerah perkotaan maupun perdesaan. Untuk Kabupaten Pinrang, jumlah sampelnya sebanyak 660 rumah tangga, tersebar dalam 66 blok sensus¹ di wilayah perkotaan dan perdesaan. Seluruh rumah tangga sampel dicacah menggunakan kuesioner VSEN21.K dan VSEN21.KP. Data yang dikumpulkan dalam Susenas meliputi keterangan umum anggota rumah tangga, kesehatan,

¹ Blok sensus adalah bagian dari suatu wilayah desa/kelurahan yang merupakan daerah kerja seorang petugas pencacah. Syarat blok sensus adalah harus memiliki batas-batas yang mudah dikenali, terletak dalam satu hamparan, serta setiap desa/kelurahan dibagi habis menjadi beberapa blok sensus.

pendidikan, ketenagakerjaan, fertilitas, perumahan, pengeluaran rumah tangga, dan kondisi sosial ekonomi rumah tangga.

2.2. Kerangka Sampel

Stratifikasi dilakukan di seluruh populasi blok sensus dan pada rumah tangga untuk menjamin keterwakilan populasi wilayah dan sampel yang lebih representatif.

1. Seluruh populasi blok sensus biasa hasil SP2020 distratifikasikan menurut klasifikasi urban/rural.
2. *Implicit stratification* rumah tangga dilakukan berdasarkan tingkat pendidikan kepala rumah, untuk menjaga keterwakilan dari nilai keragaman karakteristik rumah tangga.

Master sampling frame yang digunakan dalam pelaksanaan Susenas Maret 2021 adalah sekitar 40 persen blok sensus dari populasi yang ditarik secara *probability proportional to size* (PPS)² dengan size jumlah Kepala Keluarga (KK) hasil Rekap Daftar Penduduk (RD) SP2020.

1. Kerangka sampel tahap pertama adalah
 - a. Daftar blok sensus biasa SP2020

² *Proportional Probability to Size* (PPS) adalah salah satu desain pengambilan sampel di mana probabilitas setiap unit sampel ditentukan oleh besarnya *size* unit sampel tersebut. Dalam hal ini, unit sampelnya blok sensus dengan *size* banyaknya rumah tangga tiap blok sensus. Semakin banyak rumah tangga dalam suatu blok sensus maka probabilitas terpilihnya blok sensus tersebut sebagai sampel semakin besar.

- b. Daftar 40 persen blok sensus SP2020 yang sudah terdapat informasi kode strata.
2. Kerangka sampel tahap kedua adalah daftar rumah tangga hasil pendaftaran (listing) rumah tangga di setiap blok sensus terpilih.

2.3. Rancangan Sampel

Pencacahan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021 dilaksanakan setiap semester. Data yang dikumpulkan pada semester satu akan digunakan untuk memperkirakan (estimasi) sampai tingkat kabupaten/kota. Metode pengambilan sampel dilakukan dua tahap.

Tahap 1:

- a) Memilih 40 persen blok sensus populasi secara *Probability Proportional to Size* (PPS), dengan size jumlah KK hasil RD SP2020 di setiap strata di kabupaten.
- b) Memilih sejumlah n blok sensus sesuai alokasi secara *systematic* di setiap strata urban/rural per kabupaten/kota.

Tahap 2:

Memilih 10 rumah tangga hasil pendaftaran (listing) secara *systematic* dengan *implicit stratification* menurut pendidikan Kepala Rumah Tangga (KRT).

2.4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data setiap rumah tangga terpilih dilakukan dengan wawancara langsung antara pencacah dengan responden. Keterangan tentang rumah tangga dapat dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga lainnya yang mengetahui karakteristik yang ditanyakan. Sedangkan pertanyaan yang ditujukan untuk individu diusahakan individu bersangkutan yang menjadi responden.

2.5. Pengolahan Data

Pengolahan dilakukan mulai dari pengolahan manual (pra komputer) yang meliputi pengecekan awal atas kelengkapan isian daftar pertanyaan (pemeriksaan), pengelompokan (*batching*), pemberian kode (*coding*) serta penyuntingan (*editing*) terhadap isian yang tidak wajar. Selanjutnya tahap perekaman data (*data entry*), kompilasi data, pemeriksaan konsistensi antar isian dalam kuesioner (*validation*) sampai dengan tabulasi dilakukan dengan menggunakan komputer.

BAB III

KONSEP DAN DEFINISI

Untuk menghindari salah pengertian dalam membaca dan memahami data, maka perlu dibuat batasan kerangka berpikir sehingga diperoleh kesamaan persepsi tentang angka yang disajikan. Beberapa konsep dan definisi yang perlu diperhatikan dalam publikasi ini, yaitu:

1. **Bersekolah** adalah apabila seseorang **terdaftar dan aktif** mengikuti proses belajar baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun jenjang pendidikan non formal.
2. **Pendidikan prasekolah** adalah pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, baik melalui jalur pendidikan formal maupun melalui jalur pendidikan nonformal. Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa pendidikan prasekolah atau pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

3. **Pendidikan formal** adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang terdiri atas pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi.
4. **Pendidikan dasar** meliputi Sekolah Dasar (SD), termasuk SD kecil/pamong (pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua, dan guru), Sekolah Luar Biasa (SLB) tingkat dasar, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Umum/Kejuruan (termasuk SMP Terbuka, SMEP, ST, SKKP), dan madrasah Tsanawiyah (MTs).
5. **Pendidikan menengah** meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (antara lain: SMEA, STM, SMIP, SPG, SGA, termasuk sekolah kejuruan yang dikelola oleh kementerian selain Kemendikbud), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
6. **Pendidikan tinggi** meliputi:
 - **Pendidikan akademik** merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang termasuk program pendidikan akademik antara lain: program sarjana (S1), magister (S2), dan doktor. (S3). Lulusan program-program tersebut berhak menggunakan gelar sarjana, magister, atau doktor.

- **Pendidikan vokasi** merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. Program pendidikan vokasi antara lain: program diploma (diploma satu (D1), diploma 2 (D2), diploma tiga (D3), dan diploma empat (D4) atau sarjana terapan), magister terapan, dan doktor terapan. Lulusan program-program pendidikan vokasi berhak menggunakan gelar ahli pratama, ahli muda, ahli madya, sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan.
- **Pendidikan profesi** merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Program pendidikan profesi dapat menggunakan nama lain yang sederajat seperti program profesi dokter, insinyur, apoteker, akuntan, notaris, psikolog, guru/pendidik, dan wartawan. Sedangkan program spesialis dapat menggunakan nama lain yang sederajat dan memiliki tingkatan antara lain: program dokter spesialis dan subspecialis, program insinyur profesional pratama, madya dan utama, sesuai ketentuan yang berlaku. Lulusan program pendidikan profesi berhak menggunakan gelar profesi atau spesialis.

7. **Pendidikan non formal** yang dicakup dalam Susenas hanya pendidikan kesetaraan, yaitu pendidikan non forma; yang mencakup program Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs, dan Paket C setara SMA/MA sesuai dengan UU No.20 Tahun 2003.
8. **Status pendidikan** adalah keadaan seseorang atau penduduk pada saat pencacahan, dibedakan menjadi:
 - a. **Tidak/belum pernah bersekolah** adalah penduduk yang tidak atau belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan.
 - b. **Masih bersekolah** adalah penduduk yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal. Tidak termasuk penduduk yang mengikuti pendidikan di madrasah diniyah dan kursus-kursus.
 - c. **Tidak bersekolah lagi** adalah penduduk yang pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, tetapi pada saat pencacahan yang bersangkutan tidak lagi terdaftar dan atau tidak aktif (lagi) mengikuti pendidikan.
9. **Pendidikan tertinggi yang ditamatkan** adalah jenjang pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan seseorang yang ditandai dengan lulus ujian akhir serta mendapatkan surat tanda tamat belajar atau ijazah.

10. **Dapat membaca dan menulis** adalah jika seseorang sapat membaca dan menulis kata/kalimat sederhana dalam huruf latin/alfabet (a-z), huruf arab/hijaiyah, atau huruf lainnya (huruf jawa, kanji, dll). **Kalimat sederhana** adalah kalimat yang mengandung kata-kata yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-ahri dan setidaknya mengandung subjek dan predikat. Orang tuna netra yang dapat membaca huruf braille digolongkan dapat membaca dan menulis. Orang yang dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis atau sebaliknya, dianggap tidak dapat baca tulis.
11. **Angka Partisipasi Sekolah (APS)** adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk kelompok umur tertentu.
12. **Angka Partisipasi Murni (APM)** adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tertentu.
13. **Angka Partisipasi Kasar (APK)** adalah proporsi penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) terhadap penduduk pada kelompok umur tertentu.

14. **Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)** adalah rata-rata jumlah tahun yang telah diselesaikan oleh penduduk pada seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani.

<https://pinrangkab.bps.go.id>

BAB IV

PARTISIPASI SEKOLAH

4.1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) dapat menunjukkan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok usia tertentu terhadap penduduk dengan kelompok usia yang sesuai. Sejak tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B dan Paket C) turut diperhitungkan.

Usia penduduk dalam penghitungan APS tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA dibagi ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama usia 7-12 tahun untuk tingkat pendidikan SD, kelompok kedua usia 13-15 tahun untuk tingkat pendidikan SMP, dan kelompok ketiga usia 16-18 tahun untuk tingkat pendidikan SMA. Kajian tentang Angka Partisipasi Prasekolah/Sekolah digambarkan dalam ulasan berikut.

4.1.1. Partisipasi Siswa pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak

agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Kegiatan prasekolah meliputi pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), RA, BA, Kelompok Bermain, dan Tempat Penitipan Anak yang mempunyai program pengembangan anak. Bila syarat-syarat motorik ini telah dirangsang dengan berbagai jenis permainan maka dia akan tumbuh dan berkembang menjadi jutaan sel motorik yang akan menjadi cikal bakal dari kecerdasan anak di masa yang akan datang. Ketika anak memasuki pendidikan usia dini, yang harus dilatih adalah bagaimana cara bermain yang benar, bernyanyi dan berkreasi sesuai dengan kekuatan fisik anak. Jadi, ketika anak memasuki dunia pendidikan usia dini (setingkat taman kanak-kanak, *play group*, kelompok bermain, tempat penitipan anak/TPA) maka anak bukanlah harus belajar membaca, menulis apalagi berhitung (Hilary Clinton -1998).

Angka partisipasi pra sekolah untuk usia (0-6 tahun) di Kabupaten Pinrang mencapai 22,09 persen pada tahun 2021. Dari angka tersebut dapat dikatakan bahwa dari 100 penduduk usia 0-6 tahun, terdapat lebih dari 22 orang sudah mengikuti pendidikan pra sekolah. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 1,92 persen poin jika dibandingkan dengan partisipasi pra sekolah pada tahun 2020 (20,17 persen).

Tabel 1. Persentase Penduduk Usia 0-6 Tahun yang Masih/Pernah Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah Menurut Jenis Kelamin, 2020-2021

Partisipasi Sekolah					
Laki-Laki		Perempuan		Total	
2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21,98	20,30	18,43	24,03	20,17	22,09

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020 dan Susenas Maret 2021

4.1.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun

Untuk menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan menurut kelompok usia tertentu, maka dilakukan penghitungan Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok usia tertentu terhadap penduduk dengan kelompok usia yang sesuai. Penghitungan APS dikelompokkan untuk kelompok usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun. Secara matematis APS dapat dihitung dengan formula berikut:

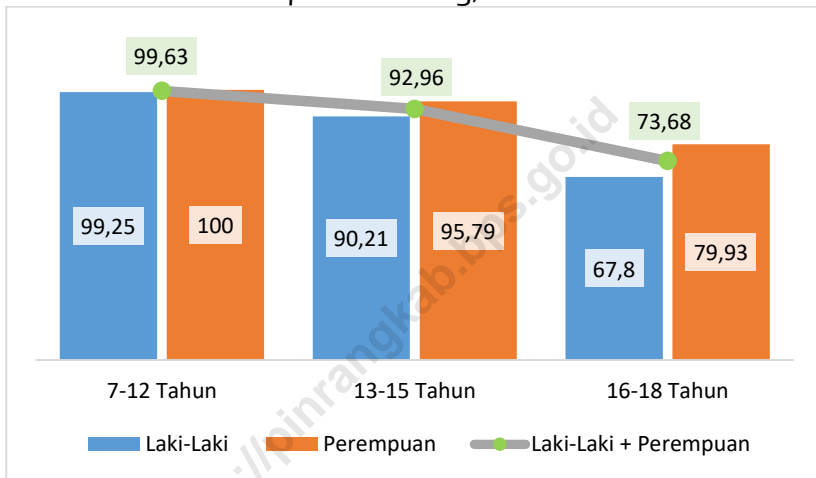
$$APS_{7-12 \text{ tahun}} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk usia 7 – 12 tahun yang **Masih Sekolah**}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 – 12 tahun}} \right) \times 100\%$$

$$APS_{13-15 \text{ tahun}} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk usia 13 – 15 tahun yang **Masih Sekolah**}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13 – 15 tahun}} \right) \times 100\%$$

$$APS_{16-18 \text{ tahun}} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk usia 16 – 18 tahun yang **Masih Sekolah**}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 – 18 tahun}} \right) \times 100\%$$

Dengan menggunakan rumus di atas, maka didapatkan hasil untuk APS Kabupaten Pinrang tahun 2021 seperti pada Gambar 1.

Gambar 1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang, 2021



Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Pada Gambar 1 terlihat bahwa APS 7-12 tahun sebesar 99,63 persen. Artinya, hampir semua anak usia 7-12 tahun di Pinrang sedang mengikuti pendidikan Sekolah Dasar. Sementara pada kelompok umur 13-15 tahun mencapai 92,96 persen. Lain halnya pada jenjang pendidikan SMA, APS 16-18 tahun hanya mencapai 73,68 persen saja. Rendahnya APS pada kelompok umur ini menandakan perlu adanya peningkatan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pencapaian pendidikan, terutama jenjang SMA pada tahun-tahun yang akan datang.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, pada kelompok umur 7-12 tahun tidak terlalu ada perbedaan yang signifikan antara APS laki-laki dan perempuan, pada kelompok umur 13-15 tahun APS perempuan (95,79 persen) lebih tinggi jika dibandingkan dengan APS laki-laki (90,21 persen). Kemudian pada kelompok umur 16-18 tahun APS perempuan (79,93 persen) juga lebih tinggi daripada APS laki-laki yaitu 67,80 persen. Dilihat dari sisi gender, pandangan bahwa laki-laki lebih diprioritaskan untuk mendapatkan pendidikan sudah semakin terkikis, kesetaraan gender dalam hal pendidikan sudah tercapai.

4.2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SMP, dan SMA

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu, berapapun usianya, terhadap jumlah penduduk kelompok usia tertentu. Indikator APK digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. Selain itu, APK juga merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Jika nilai APK menunjukkan angka mendekati atau lebih dari 100 persen berarti ada penduduk yang sekolah belum mencukupi usia atau melebihi usia yang seharusnya. Hal ini menggambarkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Tidak berbeda dengan APS dan APM, analisis APK juga perlu dilakukan pada 3 (tiga) jenjang/tingkat pendidikan, yaitu SD, SMP, dan SMA. APK pada masing-masing jenjang pendidikan tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$APK\ SD = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk yang **Masih Sekolah SD**}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 – 12 tahun}} \right) \times 100\%$$

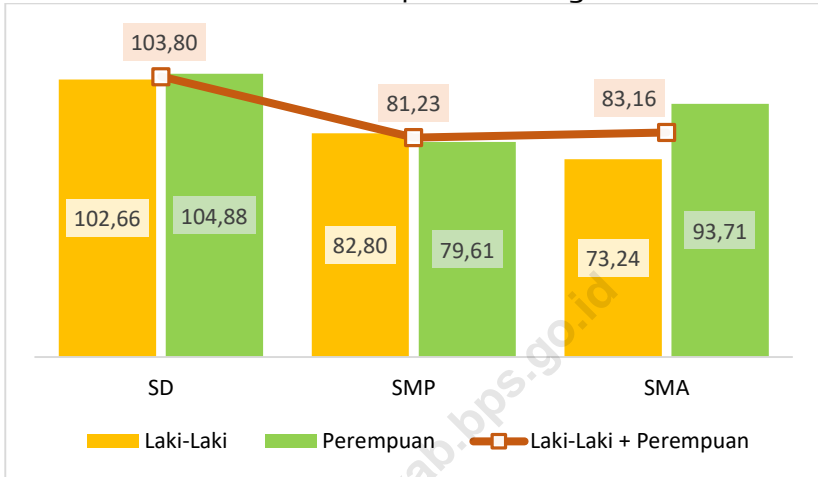
$$APK\ SMP = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk yang **Masih Sekolah SMP**}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13 – 15 tahun}} \right) \times 100\%$$

$$APK\ SMA = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk yang **Masih Sekolah SMA**}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 – 18 tahun}} \right) \times 100\%$$

Dengan menggunakan formula di atas, maka didapatkan hasil untuk APK Kabupaten Pinrang terlihat bahwa pada Gambar 2. APK SD di Kabupaten Pinrang Tahun 2021 sebesar 103,8 persen, yang berarti selain penduduk berusia 7 hingga 12 tahun yang duduk di bangku SD, terdapat penduduk yang berusia kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun yang duduk di tingkat pendidikan yang sama. Sementara itu, APK SMP sebesar 81,23 persen, dan APK SMA sebesar 83,16 persen.

Tingginya angka APK pada jenjang pendidikan SD menunjukkan bahwa masih banyak penduduk yang berminat untuk menuntaskan pendidikan dasar 6 tahunnya mengingat APK tidak memperhatikan usia dalam penghitungannya.

Gambar 2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SMP dan SMA Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang, 2021



Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

4.3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP, dan SMA

Selain APS dan APK di atas, masih ada lagi penghitungan Angka Partisipasi sekolah yang lain, yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) yang merupakan terjemahan dari *Net Enrolment Ratio* (NER). APM merupakan proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Seperti halnya APS, APM juga bisa digunakan untuk melakukan kajian di ketiga jenis/jenjang pendidikan, yaitu pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Untuk pengkajiannya di masing-masing jenjang pendidikan, digunakan formula sebagai berikut :

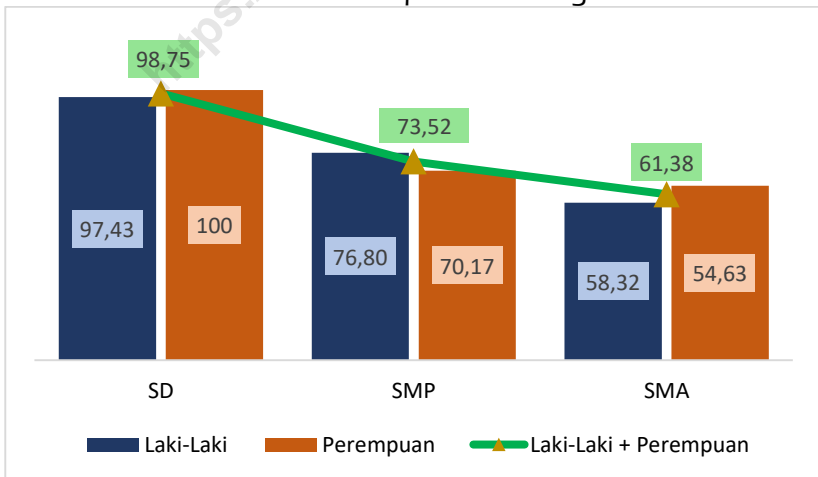
$$APM\ SD = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Masih Sekolah SD usia 7 – 12 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 – 12 tahun}} \right) \times 100\%$$

$$APM\ SMP = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Masih Sekolah SMP usia 13 – 15 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13 – 15 tahun}} \right) \times 100\%$$

$$APM\ SMA = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Masih Sekolah SMA usia 16 – 18 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 – 18 tahun}} \right) \times 100\%$$

Manfaat dari angka ini adalah untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Selain itu, APM juga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya.

Gambar 3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP, dan SMA Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang Tahun 2021



Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

APM SD digunakan untuk mengetahui partisipasi sekolah anak SD ditinjau dari ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikan SD. Pada tahun 2021, APM SD di Kabupaten Pinrang mencapai 98,75 persen. Tinggi rendahnya nilai APM ini lebih disebabkan oleh kesesuaian penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang SD.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP tahun 2021 di Kabupaten Pinrang sebesar 73,52 persen. Jika dilihat dari sisi gender, APM SMP menunjukkan adanya perbedaan sebesar 6,63 persen poin antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan ini dirasa tidak terlalu tinggi sehingga tidak menjadi penghalang baik bagi laki-laki maupun perempuan dalam menuntut pendidikan di tingkat SMP. Artinya, kesempatan bersekolah pada jenjang SMP terbuka lebar bagi siapapun.

Pada tahun 2021 APM SMA di Kabupaten Pinrang mencapai 61,38 persen. APM SMA paling rendah jika dibandingkan dengan APM SD dan APM SMP, namun demikian APM SMA ini dapat menggambarkan pencapaian program-program pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pinrang selama tahun 2021.

BAB V

CAPAIAN PENDIDIKAN

5.1. Angka Buta Huruf

Angka Buta Huruf merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai kemampuan membaca dan menulis, baik huruf latin maupun huruf lainnya, terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Kemampuan membaca yang dimaksud disini tidak dituntut harus bisa mengerti apa yang dibaca/ditulisnya.

Manfaat angka ini adalah untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Negara Indonesia sendiri telah ikut serta menandatangani MDGs (*Milenium Development Goals*) yang di luncurkan oleh *United Nation* (PBB). Salah satu tujuannya adalah pada tahun 2015 diharapkan buta aksara di kalangan marginal dapat dikurangi minimal menjadi 50 persen. Sebagai bagian dari dunia global, Kabupaten Pinrang khususnya pun wajib mencapai target tersebut. Pada tingkat makro, ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah tingkat melek huruf yang mengindikasikan kemampuan penduduk untuk dapat membaca dan menulis.

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka

terhadap pengetahuan. Tingkat melek huruf yang tinggi (atau tingkat buta huruf rendah) menunjukkan adanya sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan penduduknya untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran. Angka melek huruf berbanding terbalik dengan angka buta huruf, yaitu persentase penduduk 15 tahun ke atas yang tidak bisa membaca dan menulis, baik huruf latin dan atau huruf lainnya. Semakin tinggi angka melek huruf suatu wilayah berarti angka buta hurufnya akan semakin rendah.

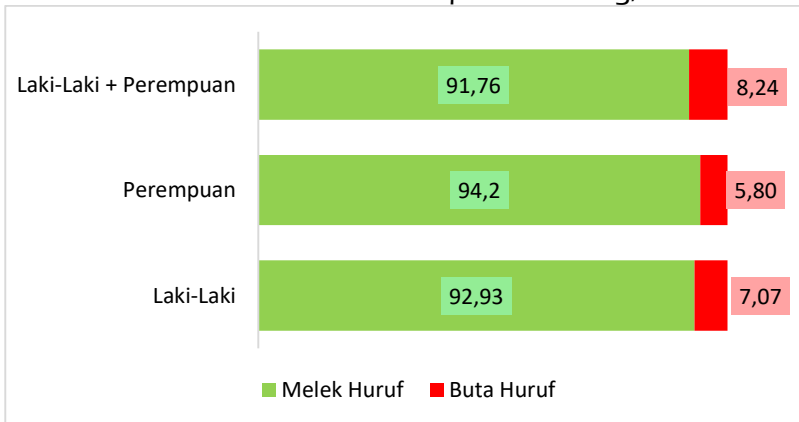
Pada tahun 2021, tercatat penduduk Kabupaten Pinrang yang berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis baik itu huruf latin maupun huruf lainnya mencapai 91,76 persen. Angka ini mengalami penurunan sebesar 1,62 persen poin jika dibandingkan dengan AMH tahun 2020 yaitu 93,38 persen. Dengan kata lain, kedepannya, kewajiban Pemerintah Kabupaten Pinrang untuk menuntaskan buta aksara adalah sebanyak 8,24 persen dari keseluruhan penduduk usia 15 tahun ke atas. Beban ini sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 7,62 persen.

Usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis penduduk, antara lain melalui program paket A, paket B, dan program

keaksaraan fungsional. Melalui program ini diharapkan penduduk yang tidak pernah sekolah mampu membaca dan menulis huruf latin, termasuk juga mampu berbahasa Indonesia. Harapannya, mereka mempunyai kesempatan untuk memperoleh tambahan pengetahuan melalui media cetak dan elektronik.

Buta huruf pada penduduk laki-laki lebih besar daripada penduduk perempuan. Angka buta huruf laki-laki tahun 2021 sebesar 7,07 persen sedangkan angka buta huruf perempuan sebesar 5,80 persen. Upaya pemberantasan buta huruf melalui kursus/pelatihan keaksaraan fungsional atau program kejar paket A dan paket B yang mengarah pada tujuan penuntasan buta aksara harus lebih ditingkatkan, sehingga upaya mewujudkan komitmen MDG's dapat terwujud tuntas di tahun tahun berikutnya.

Gambar 4. Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang, 2021



Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Guna memperjelas kajian di atas, perlu dilakukan kajian yang spesifik mengarah pada angka buta huruf menurut kelompok usia untuk membantu menentukan kebijakan program pembangunan yang tepat, khususnya dalam pemberantasan buta huruf. Dengan demikian, program dapat diarahkan pada sasaran yang lebih efektif dan terarah. Tabel 2 menyajikan angka buta aksara menurut kelompok remaja (15-24 tahun), kelompok dewasa (25-59 tahun) dan kelompok lansia (60 tahun ke atas), di Kabupaten Pinrang tahun 2021.

Tabel 2. Angka Buta Huruf (ABH) Penduduk 15 Tahun ke atas Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang, 2021

Jenis Kelamin	Kelompok Umur		
	15-24	25-59	60+
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-Laki	2,22	55,46	42,32
Perempuan	-	28,29	71,71
Total	0,87	38,99	60,13

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Tabel 2 menunjukkan bahwa sebaran buta aksara pada penduduk 15 tahun ke atas sebagian besar berada pada kelompok usia 60 tahun ke atas atau pada kelompok lansia. Sebesar 60,13 persen penduduk lansia tergolong sebagai buta aksara. Sedangkan untuk kelompok usia dewasa (25-59 tahun)

terdapat 38,99 persen penduduk yang masih belum bisa baca tulis, dan untuk kelompok usia remaja (15-24) tahun, sebesar 0,87 persen yang buta aksara.

Dilihat dari sisi gender, pada kelompok usia lansia (60 tahun keatas) buta huruf untuk perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, namun pada kelompok usia remaja dan dewasa buta huruf laki-laki lebih tinggi dari buta huruf perempuan. Program pengentasan buta aksara mungkin telah berhasil pada kelompok usia remaja (15-24) tahun. Terlihat dari persentase penduduk buta aksara yang relatif kecil..

Hal ini bisa disebabkan oleh program pengentasan yang dilakukan kemungkinan besar hanya diikuti oleh penduduk kelompok usia dewasa saja (25-59 tahun), sedangkan persentase terbesar buta huruf berada pada kelompok usia tua yaitu 60 tahun ke atas. Selain itu, mayoritas perempuan yang telah menginjak usia tua (60 tahun ke atas) yang berdomisili di pedesaan cenderung disibukkan dengan urusan rumah tangga sehingga waktunya menjadi terbatas untuk mengikuti pendidikan. Disamping itu, persepsi perempuan lansia akan pentingnya pendidikan masih rendah, sehingga hal ini menghambat keberhasilan program pengentasan buta aksara.

5.2. Penduduk yang Tidak Bersekolah Lagi

Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, Indonesia mempunyai cita-cita luhur untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Cita-cita luhur ini diimplementasikan ke dalam kegiatan pembangunan di bidang pendidikan dengan melaksanakan berbagai program ke arah tersebut. Salah satu upaya meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas adalah melalui peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang. Selain itu dengan melakukan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang mencakup pemberian bantuan pendidikan memadai bagi anak keluarga kurang mampu termasuk Program KIP Kuliah. Selain itu, pemerintah turut melakukan pemerataan layanan pendidikan antarwilayah salah satunya dengan menerapkan model layanan yang tepat untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Selanjutnya, untuk melakukan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun, pemerintah melakukan penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) untuk kembali bersekolah salah satunya dengan menerapkan model pembelajaran tepat untuk anak berkebutuhan khusus, anak yang bekerja, berhadapan dengan hukum, terlantar, jalanan,

dan di daerah bencana. Selain itu, peran keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan turut perlu ditingkatkan. (Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024).

Tabel 3. Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang, 2021

Karakteristik	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih Bersekolah			Tidak bersekolah lagi
		SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/ MA ke atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki-laki	0,27	36,73	15,22	17,05	30,73
Perempuan	0,30	40,04	14,43	24,48	20,75
Kabupaten Pinrang	0,29	38,38	14,82	20,74	25,77

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

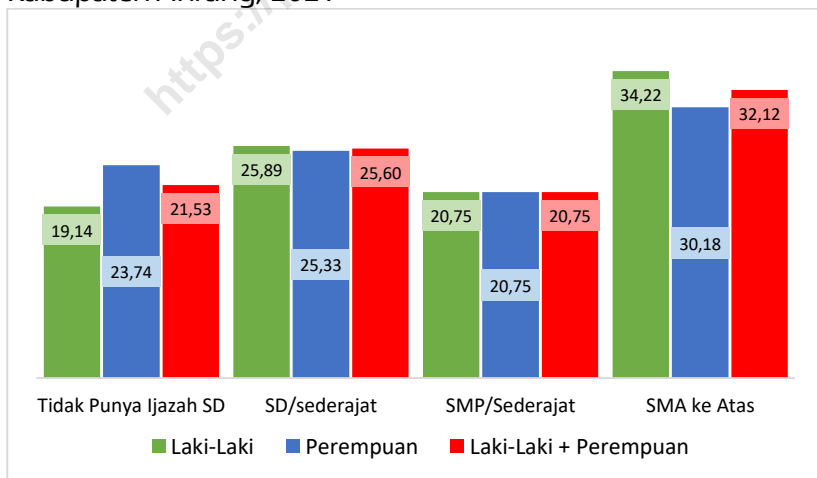
Pada tahun 2021, tercatat penduduk Kabupaten Pinrang usia 7-24 tahun yang masih menempuh pendidikan (masih bersekolah) sebesar 73,94 persen. Namun demikian, masih terdapat penduduk Pinrang usia 7-24 tahun yang tidak atau belum pernah bersekolah, yaitu sebesar 0,29 persen.

5.3. Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk dapat menjadi salah satu indikator dari tingkat

kemampuan SDM. Pada tahun 2021 persentase penduduk Kabupaten Pinrang usia 15 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan SD dan SMP sebesar 46,35 persen, yang mempunyai ijazah SMA dan perguruan tinggi sebesar 32,12 persen, dan sisanya sebesar 21,53 persen penduduk Kabupaten Pinrang usia 15 tahun ke atas tidak mempunyai ijazah SD. Komposisi ini menunjukkan bahwa capaian pendidikan di Kabupaten Pinrang masih relatif rendah karena proporsi penduduk yang mengenyam pendidikan hingga pendidikan dasar lebih banyak dibanding penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi.

Gambar 5. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang, 2021



Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

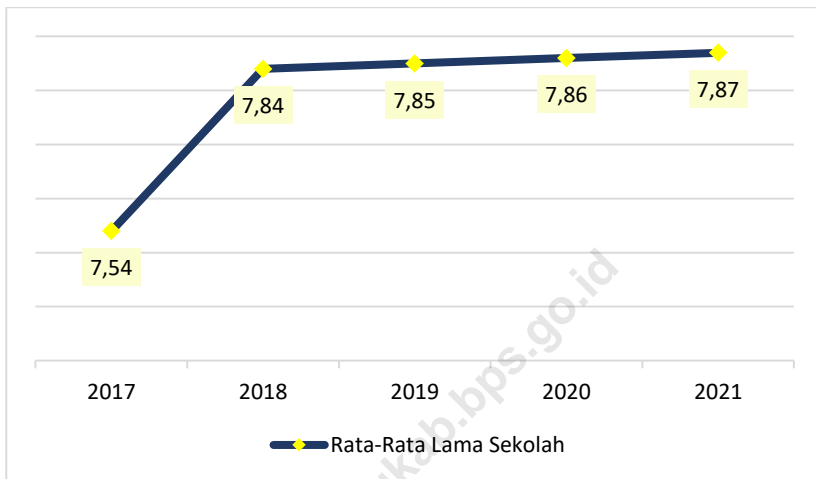
5.4. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Merupakan rata-rata jumlah tahun yang telah diselesaikan oleh penduduk pada seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Proses penghitungannya menggunakan tiga variabel simultan yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan, dan ijazah tertinggi yang dimiliki. Rata-rata lama sekolah dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Semakin tinggi angka Rata-rata Lama Sekolah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Tingginya angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang telah ditamatkan.

Tahun 2021, rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Pinrang tumbuh sebesar 0,13 persen jika dibandingkan dengan tahun 2020. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Pinrang adalah 7,87 tahun atau setara dengan SMP/MTs kelas VII hingga VIII. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan terhadap akses pendidikan yang lebih merata tidak hanya berfokus di pusat kota saja tetapi juga untuk daerah sulit, di pinggiran kota ataupun kecamatan terpencil.

Gambar 6. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas di Kabupaten Pinrang, 2017-2021



Sumber: BPS

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

6.1. Fasilitas Pendidikan dan Jumlah Siswa

Fasilitas pendidikan baik berupa gedung maupun pendidikannya merupakan faktor yang paling utama untuk memajukan pendidikan. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, penyelenggara pendidikan di Indonesia tidak hanya terbatas pada pemerintah tetapi juga dapat melibatkan masyarakat (swasta) untuk memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Tabel 4 menunjukkan bahwa di Kabupaten Pinrang, jumlah sekolah baik negeri maupun swasta pada jenjang pendidikan SD sebanyak 323 sekolah, MI sebanyak 29 sekolah, SMP sebanyak 58 sekolah, MTs sebanyak 26 sekolah, SMA sebanyak 15 sekolah, MA sebanyak 9 sekolah, SMK sebanyak 16 sekolah, dan 1 SLB. Jumlah seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Pinrang pada tahun 2021 adalah 477 sekolah dengan jenjang pendidikan SD/ sederajat sampai SMA/ sederajat. Dalam 477 sekolah tersebut terdapat murid/ siswa sebanyak 79.021 siswa dan tenaga pendidik (guru) sebanyak 6573 guru. Sama halnya dengan jumlah sekolah, jumlah tenaga pendidik dan jumlah murid yang terbesar berada pada tingkat pendidikan SD.

Tabel 4. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pinrang, 2021

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah			Jumlah Guru	Jumlah Murid
	Negeri	Swasta	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD	315	8	323	3.159	41.764
MI	1	28	29	311	3.348
SMP	52	6	58	1.349	13.886
MTS	1	25	26	514	3.929
SMA	11	4	15	472	7.582
MA	1	8	9	179	854
SMK	10	6	16	574	7.609
SLB	1	0	1	15	49
Total	392	85	477	6.573	79.021

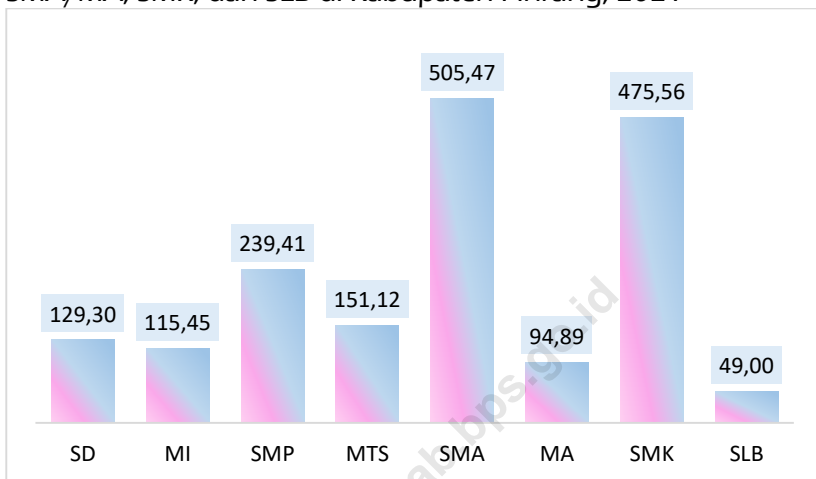
Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, data semester ganjil tahun ajaran 2021/2022;

Kementerian Agama, data semester ganjil tahun ajaran 2021/2022

6.2. Rasio Murid/Siswa terhadap Sekolah dan Guru

Gambar 7 memperlihatkan rasio murid terhadap sekolah untuk semua jenjang di Kabupaten Pinrang tahun 2021. Indikator ini menunjukkan daya tampung rata-rata untuk setiap jenjang pendidikan. Daya tampung SD di Kabupaten Pinrang adalah 129,30 murid. Hal ini berarti bahwa rata-rata setiap SD di Kabupaten Pinrang mampu menampung antara 129 sampai 130 murid pada satu sekolah tersebut.

Gambar 7. Rasio Murid Terhadap Sekolah Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan SLB di Kabupaten Pinrang, 2021



Sumber : Tabel 4, diolah

Untuk MI, rata-rata daya tampung setiap sekolah di Kabupaten Pinrang adalah antara 115 sampai 116 murid di satu MI. Rata-rata daya tampung setiap SMP di Kabupaten Pinrang adalah 239 sampai 240 murid di satu SMP dan rata-rata daya tampung setiap MTs di Kabupaten Pinrang adalah 151 sampai 152 murid di satu MTs. Kemudian daya tampung rata-rata setiap SMA di Kabupaten Pinrang adalah 505 sampai 506 murid di tiap SMA dan untuk MA adalah 94 sampai 95 murid di tiap sekolah. Selanjutnya SMK memiliki daya tampung rata-rata antara 475 hingga 476 murid. Terakhir, untuk SLB di Kabupaten Pinrang daya tampungnya adalah 49 murid di satu sekolah.

Gambar 8. Rasio Murid Terhadap Guru Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK di Kabupaten Pinrang, 2021



Sumber : Tabel 4, diolah

Gambar 8 menunjukkan rasio murid terhadap guru, di mana dapat dilihat beban mengajar untuk setiap guru, rata-rata beban mengajar satu orang guru SD di Kabupaten Pinrang adalah 13 sampai 14 orang murid dan rata-rata beban guru MI dan SMP adalah antara 10 sampai 11 murid. Rata-rata beban guru MTs di Kabupaten Pinrang adalah antara 7 hingga 8 murid, kemudian beban guru SMA rata-rata adalah 16 sampai 17 murid. Pada jenjang MA, beban guru rata-rata antara 4 sampai 5 murid sedangkan pada jenjang SMK yaitu antara 13 sampai 14 murid. Guru SLB mempunyai beban rata-rata mengajar 3 sampai 4 murid.

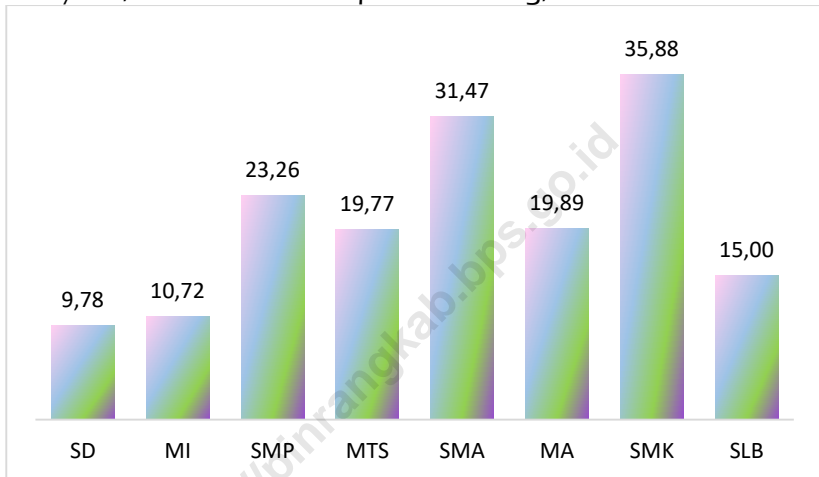
Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid

sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Pasal 17 menyebutkan bahwa seorang guru pada jenjang SD, SMP, dan SMA idealnya bertanggung jawab atas 20 murid. Sedangkan, seorang guru pada jenjang SMK idealnya bertanggung jawab atas 15 murid. Dari gambar 7 terlihat bahwa rasio murid-guru jenjang SD sampai SMA di Kabupaten Pinrang sudah cukup ideal dengan standar yang sudah ditetapkan.

Meskipun demikian, rasio murid-guru bukanlah faktor mutlak penentu keberhasilan anak dalam proses belajar. Idealitas rasio tersebut akan bergantung kepada beberapa faktor. Rasio murid-guru di kelas akan memengaruhi manajemen kelas, proses belajar mengajar di kelas. Namun, hal tersebut bukanlah satu-satunya indikator penentu kualitas belajar di kelas. Keterampilan dan pengalaman guru juga perlu dipertimbangkan. Salah satu cara meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas dapat melalui peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata. Hal tersebut mencakup peningkatan kualitas pendidikan calon guru melalui revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Selain itu, dapat juga dengan pemenuhan kualifikasi akademik minimal untuk

guru, yakni S1/DIV dan dengan peningkatan kesejahteraan pendidik.

Gambar 9. Rasio Guru Terhadap Sekolah Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK di Kabupaten Pinrang, 2021



Sumber : Tabel 4, diolah

Informasi dari Gambar 8 menunjukkan rata-rata jumlah guru yang mengajar pada satu sekolah. Jenjang SD rata-rata memiliki 9 sampai 10 guru dan jenjang MI rata-rata memiliki 10 sampai 11 orang guru. Pada jenjang SMP memiliki 23-24 guru, MTs dan MA memiliki antara 19 sampai 20 guru, SMA memiliki 31 sampai 32 guru, SMK memiliki 35 sampai 36 guru, dan SLB memiliki 15 guru.

BAB V

PENUTUP

Dari hasil kajian data Susenas Maret 2021 sebelumnya, dan hasil analisis dengan menggunakan beberapa indikator pendidikan yang ada, dapat disimpulkan beberapa hal penting yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Pinrang, antara lain:

1. Partisipasi sekolah anak usia dini (0-6 tahun) baru mencapai 27,36 persen di tahun 2021, meningkat 7,19 persen poin apabila dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 20,17 persen. Mengingat betapa pentingnya upaya peningkatan kualitas SDM sejak usia dini, maka program ini perlu dipacu terutama di beberapa kecamatan di Kabupaten Pinrang yang belum ada fasilitas PAUD. Perlu juga ditingkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan anak usia dini, mengingat ada beberapa fasilitas PAUD tidak beroperasi lagi dikarenakan tidak ada siswa yang mendaftar.
2. Dari hasil perhitungan angka partisipasi sekolah, baik APS, APK maupun APM di Kabupaten Pinrang, ada kecenderungan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin kecil angka partisipasinya. Semakin rendahnya angka partisipasi tersebut lebih banyak disebabkan oleh rendahnya partisipasi sekolah

baik dari penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan.

3. Hingga tahun 2021 masih terdapat 8,24 persen penduduk Kabupaten Pinrang usia 15 tahun ke atas yang tidak bisa membaca dan menulis (buta aksara).
4. Di Kabupaten Pinrang masih ada sekitar 0,29 persen dari penduduk berusia 7-24 tahun yang tidak/belum pernah sekolah. Dilihat dari segi gender, tidak ada perbedaan yang signifikan antara penduduk laki-laki dan perempuan dengan status pendidikan tidak/belum pernah bersekolah.
5. Partisipasi penduduk Kabupaten Pinrang dalam menempuh pendidikan hingga tingkat menengah dan tinggi tahun 2021 masih perlu ditingkatkan karena persentase penduduk yang bersekolah di jenjang pendidikan yang tinggi semakin berkurang dibandingkan dengan jenjang pendidikan di bawahnya.
6. Pada tahun 2021 masih ada sekitar 21,53 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai ijazah SD. Persentase perempuan 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai ijazah SD lebih tinggi daripada laki-laki.
7. Pada tahun ajaran 2021/2022 semester ganjil, jumlah guru terbanyak ada pada jenjang SD/MI, sebanding dengan banyaknya sekolah pada jenjang SD/MI.

8. Rasio murid terhadap guru di Kabupaten Pinrang pada tahun ajaran 2021/2022 semester ganjil sudah cukup ideal sesuai standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Semakin tinggi nilai rasio, beban kerja guru dalam mengajar juga semakin besar, oleh karena itu akan semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. 2020. *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang: Pinrang.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. 2021. *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2021*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang: Pinrang.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. 2022. *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pinrang 2022*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang: Pinrang.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. 2022. *Kabupaten Pinrang Dalam Angka 2022*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang: Pinrang.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. 2022. *Statistik Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 2021*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan: Makassar.
- Kementerian PPN/Bappenas. 2019. *Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Versi 14 Agustus 2019)*. Kementerian PPN/Bappenas: Jakarta.

LAMPIRAN

Tabel 1. RSE Angka Partispasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Formal dan Nonformal Penduduk menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin, 2021

Karakteristik	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
APS			
7-12 tahun	0,53	0,00	0,26
13-15 tahun	3,66	2,16	2,11
16-18 tahun	8,73	6,12	5,26
APM			
SD	1,28	0,00	0,62
SMP	7,12	8,36	5,48
SMA	11,17	9,46	7,29

Tabel 2. RSE Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, 2021

Karakteristik	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih Bersekolah			Tidak bersekolah lagi
		SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	56,60	7,60	14,12	13,36	8,60
Perempuan	73,86	6,75	13,48	9,80	10,67
Kabupaten Pinrang					
	47,10	5,07	9,78	7,99	6,73

Tabel 3. RSE Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2021

Karakteristik	Tidak Punya Ijazah SD	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ ke atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	7,75	6,25	7,17	5,31
Perempuan	6,29	6,17	7,02	5,49
Kabupaten Pinrang				
	4,89	4,39	5,02	3,82

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PINRANG**

Jl. Andi Isa No.18, Pinrang, Sulawesi Selatan

Telp: (0421) 921 021

Email : bps7315@bps.go.id

Homepage : pinrangkab.bps.go.id

